

SEMINAR HASIL LAPORAN PENYUSUNAN *BACKGROUND STUDY* RPJMN 2025-2029

Direktorat Politik dan Komunikasi
Jumat, 16 Desember 2022



Dasar Hukum

UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 & Ps. 2 Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Penyusunan BS RPJMN 2025-2029 Bidang Politik dan Komunikasi sebagai skenario jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 yang memuat rancangan **arah, sasaran, dan strategi** pembangunan daerah yang meliputi pembangunan **kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, komunikasi dan media**.

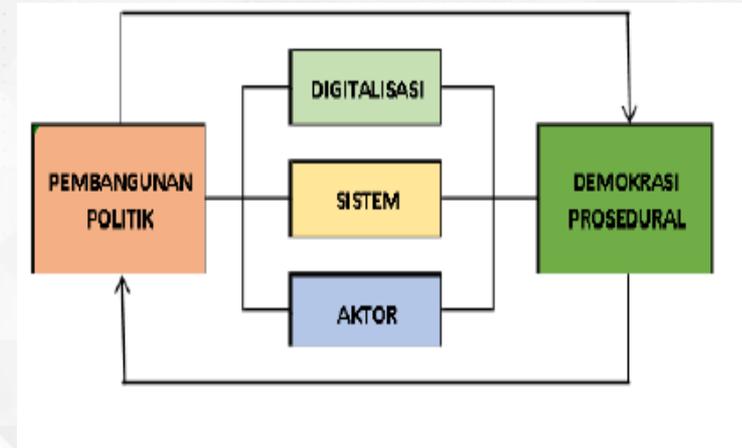


RPJMN 2025-2029

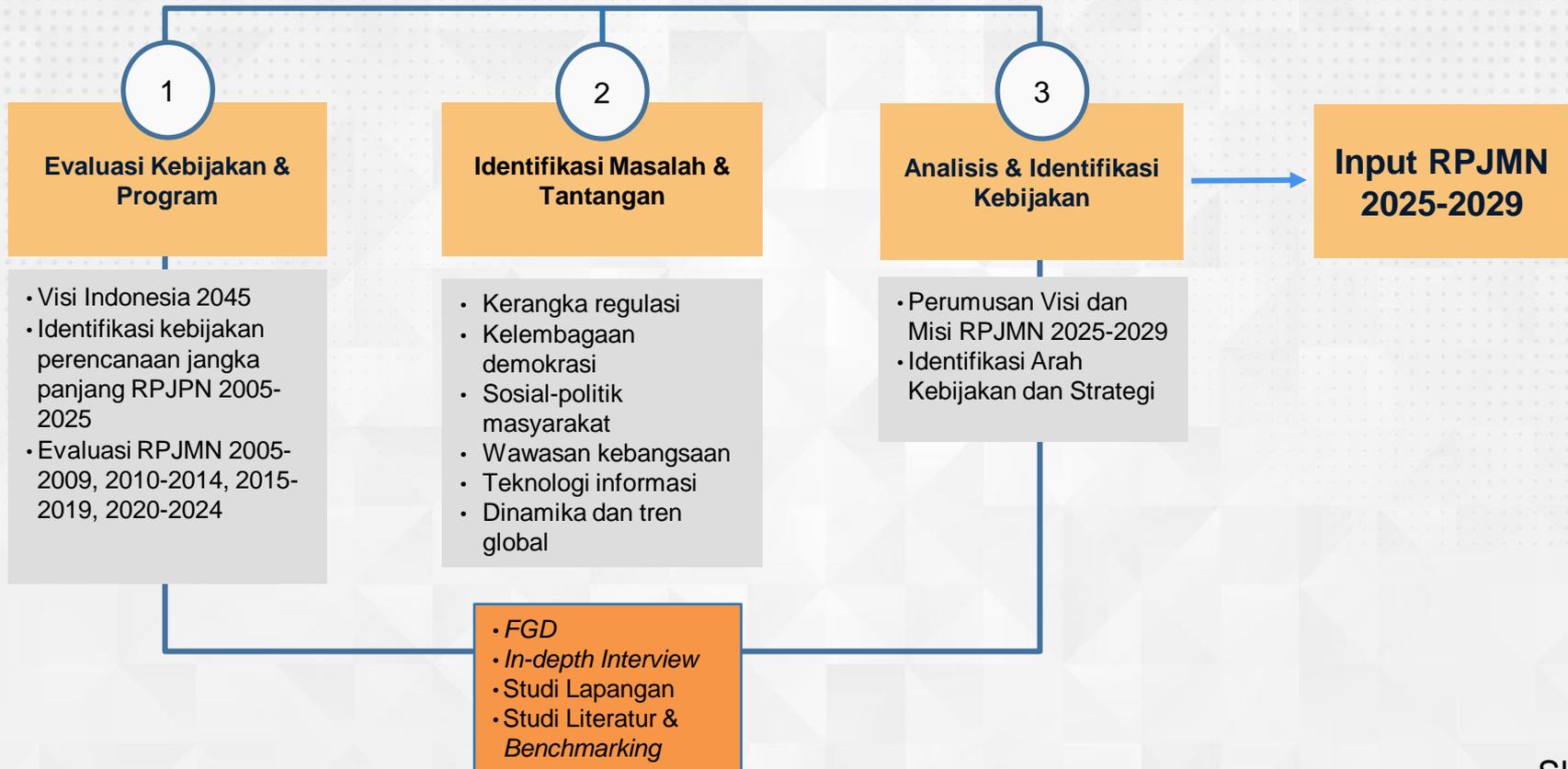
“Meningkatkan **kualitas demokrasi prosedural** melalui **penguatan lembaga demokrasi** dengan menciptakan **pemerintahan yang akuntabel** berbasis digital, **parlemen modern**, dan **parpol yang berbasis nilai.**”

DEMOKRASI PROSEDURAL SEBAGAI JENDELA

DEMOKRASI KLASIK: POPULISTIK VS POLIARKI	DEMOKRASI DELIBERATIF	DEMOKRASI DIGITAL
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Populistik</u>: “<i>demos</i>” “<i>kratos</i>” dari, oleh dan untuk rakyat. • <u>Dahl</u>: Poliarki • <u>Mayo</u>: Gaya hidup dan tata moral (prosedural yang dipersyaratkan: pergantian, dan perselisihan). 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Habermas</u>: <i>Public sphere</i> untuk mencari kebenaran / consensus. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Van Dijk</u>: Demokrasi tanpa tanpa batas waktu, ruang dan fisik. • <u>Hague & Loader</u>: Partisipasi inklusif, jembatan warga negara - elit politik.



Transformasi digital melahirkan ‘dimensi baru’ kehidupan demokrasi: **demokrasi digital**. Dalam lingkungan digital yang kondusif sebagai prasyarat, pembangunan bidang politik dan komunikasi perlu ditekankan kepada sistem politik dan aktor-aktor yang terlibat untuk mendukung demokrasi prosedural. Pada sistem politik, tercermin dalam terbangunnya regulasi **sistem pemilihan, sistem kepartaian dan sistem representasi yang efektif**. Aktor mencerminkan **pelaku dalam proses politik** yang mewakili lembaga demokrasi (suprastuktur & infrastruktur). Serta digitalisasi yang mendorong **mekanisme partisipasi masyarakat** melalui berbagai saluran komunikasi.



Pendahuluan

Konsolidasi tim, penyusunan disain studi, pengumpulan data sekunder dan *review* dokumen.

Pengumpulan Data Lapangan

Wawancara mendalam & FGD dengan mitra, akademisi dan praktisi di Jakarta serta *Study Visit* ke:

- Padang (14-16 Jul 2022)
- Balikpapan (6-8 Sept 2022)
- Purwokerto (27-29 Sept 2022)
- Jogjakarta (17-19 Nov 2022)

Pengolahan Data

Transkripsi data primer, pengolahan dan analisis data, penulisan draft laporan studi, serta koordinasi draft laporan BS RPMJN dengan BS RPJPN dan Direktorat Polkom.

Seminar Akhir

Diseminasi draft laporan studi untuk mendapatkan tanggapan dan finalisasi draft laporan.

Penyerahan Laporan Akhir BS RPJMN 2025 & 2029

Apr – Jun 2022

Jul - Nov 2022

Okt – Des 2022

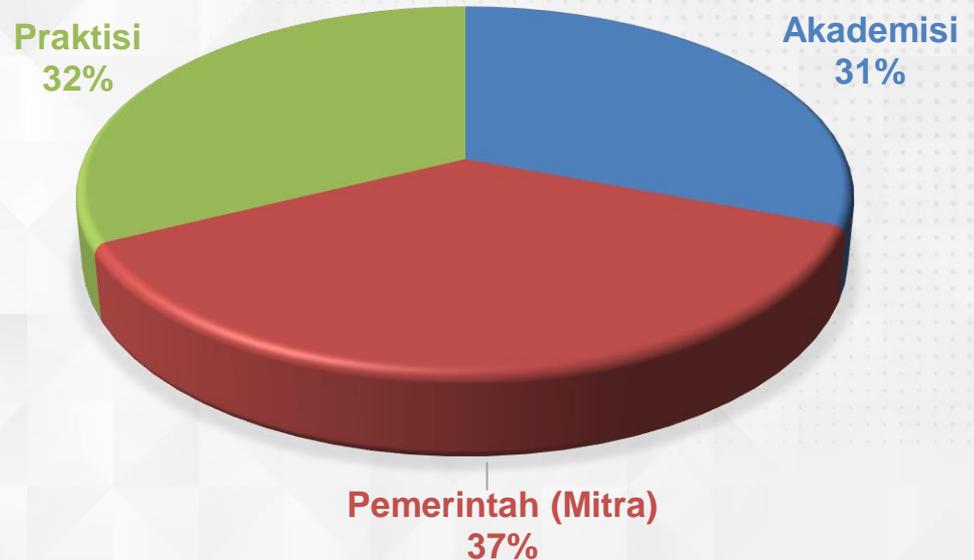
Des 2022

Des 2022

Sebanyak **65 informan*** telah dihimpun melalui *in-depth interview* dan *focus group discussion* yang dilakukan di Jakarta (Juli-Oktober 2022), Padang (14-16 Juli 2022), Balikpapan (6-8 September 2022), Purwokerto (27-29 September 2022), dan Yogyakarta (17-19 November 2022).

Komposisi informan* terdiri dari **akademisi (20 orang)**, **mitra pemerintah pusat/daerah (24 orang)**, dan **praktisi (21 orang)**.

*Catatan: di luar informan Seminar Akhir BS RPJPN & RPJMN (Bandung,16/12).

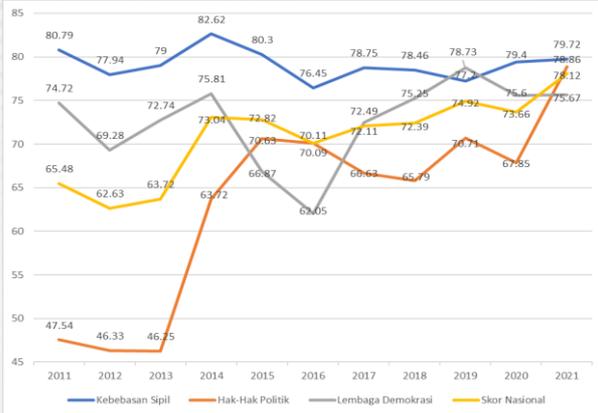


- Kondisi demokrasi masih **bersifat prosedural**
- Demokrasi prosedural penting menentukan proses menuju demokrasi substansial. **Tidak ada demokrasi substantif tanpa ada prosedur yang demokratis dan terlembaga.**

Tantangan utama pembangunan demokrasi :

1. Tingginya biaya politik (Indonesia peringkat 3 di dunia – prevalensi politik uang)
2. Besarnya pengaruh kelompok kepentingan (dominasi oligarki)
3. Menguatnya politisasi isu-isu identitas (SARA)
4. Lemahnya pengawasan masyarakat sipil dan pers
5. Adanya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil (antara lain: kebebasan berpendapat/otoritarianisme digital)
6. Berkembangnya praktik diskriminasi dan intoleransi di Indonesia yang memicu konflik

Indeks Demokrasi Indonesia BPS Tahun 2011-2021

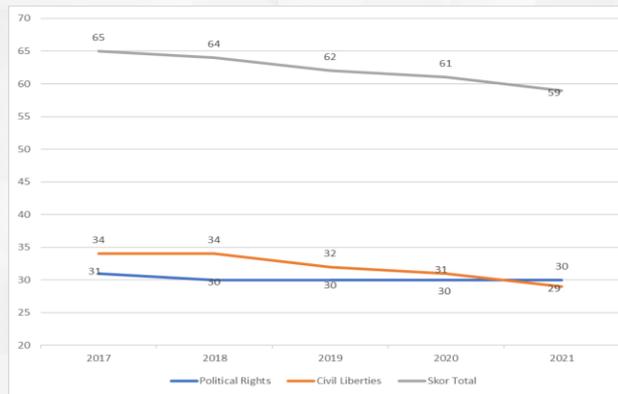


IDI: dinamika demokrasi 10 tahun terakhir. Kebebasan tinggi, partisipasi politik yang buruk akibat masifnya tindakan kekerasan dalam penyampaian aspirasi. Lembaga demokrasi lokal (pemda & DPRD) capaian rendah.

THE GLOBAL STATE OF DEMOCRACY 2021
Building Resilience in a Pandemic Era

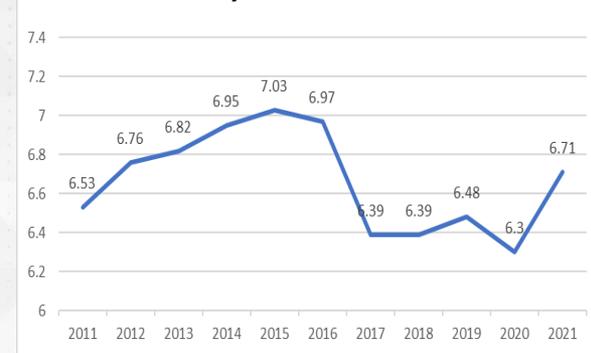
Idea International: GSoD 2021 menyorot kehidupan demokrasi Indonesia yang konfrontatif dan terpolarisasi; disinformasi di ruang digital mempengaruhi opini publik dan kebebasan berpikir warga.

Freedom in the World FH Tahun 2017-2021



Freedom House: *Partly Free Democracy* dalam 5 tahun terakhir. Sorotan FH tahun 2020 terkait politik keterwakilan (gender, etnis, agama) yang belum maksimal; kebebasan sipil menurun.

Tren Democracy Index EIU Tahun 2011-2021

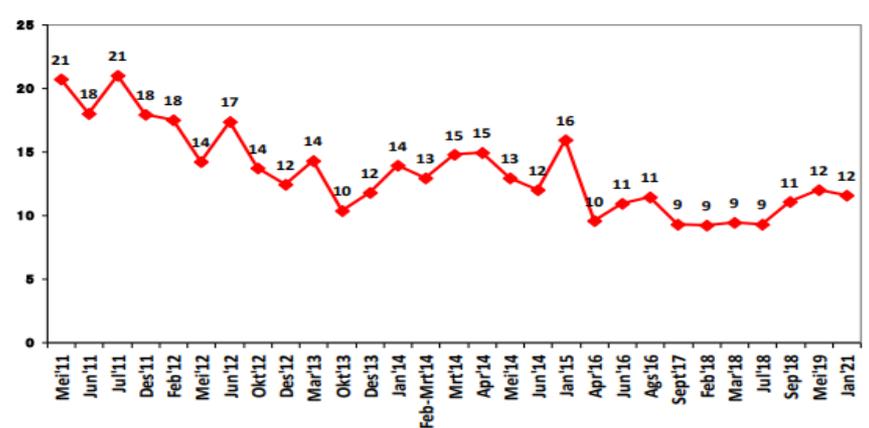


EIU: *Flawed Democracy* dalam 10 tahun terakhir. Terendah di tahun 2020 akibat partisipasi minim dalam pengambilan kebijakan dan ancaman independensi peradilan akibat kuatnya intervensi pemerintah.

Tantangan

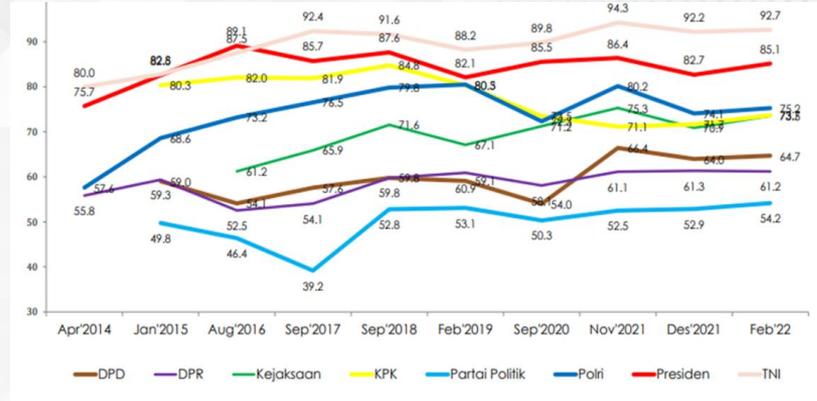
- **Demokrasi masih bersifat prosedural: kebebasan tinggi, tidak diimbangi kualitas lembaga demokrasi.**
- **Partisipasi masyarakat rendah, banyaknya kasus kekerasan massa karena karena belum terbentuknya keadaban sipil (*civic virtues*)**
- **Polarisasi masyarakat, tantangan kebebasan sipil: fenomena *freedom to hate*.**
- **Lemahnya kontrol masyarakat sipil dan media.**

Tren Party Identification 2011-2021 - LSI



Public trust yang rendah terhadap parpol ditunjukkan melalui Party ID yang turun dalam 10 tahun terakhir (LSI). Parpol berorientasi elektoral dengan bersifat *catch-all/big tent party*.

Tren Surnas Kepercayaan Institusi Negara Tahun 2014-2022 - IPI

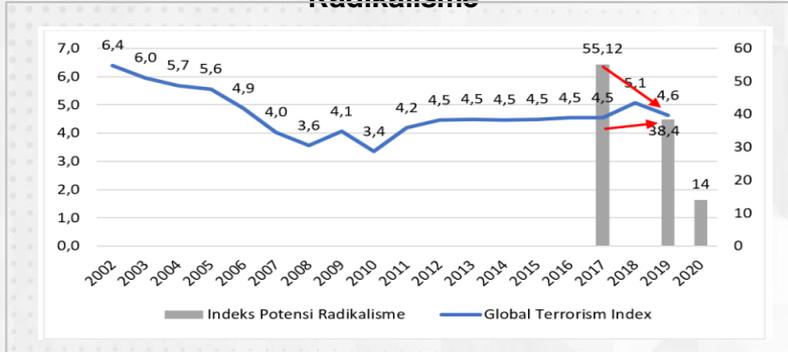


Rendahnya *public trust* parpol tercermin pula di lembaga legislatif dalam 8 tahun terakhir (Indikator). Hubungan dengan konstituen serta kapasitas legislator menjadi evaluasi lembaga perwakilan.

Tantangan

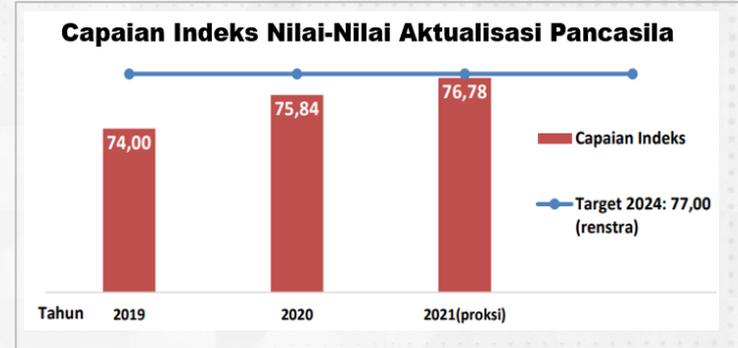
- Dua pilar demokrasi (Parpol dan DPR/DPD) kurang berperan: kapasitas, *public trust*, *party ID*.

Global Terrorism Index dan Indeks Potensi Radikalisme



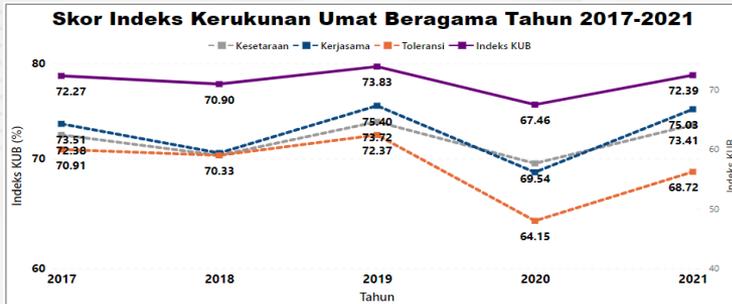
Tingkat **potensi radikalisme yang menurun** tajam belum tentu berkaitan erat dengan penurunan potensi terjadinya tindakan terorisme.

Capaian Indeks Nilai-Nilai Aktualisasi Pancasila



Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan secara konsisten dan memenuhi target di tahun 2021.

Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017-2021

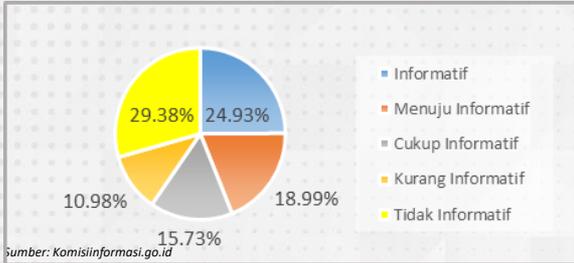


Tren indeks KUB sejak tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa skornya bersifat **fluktuatif**. Dari ketiga indikator yang dinilai, indikator **toleransi selalu mendapatkan angka terendah** selama lima tahun berturut-turut dibandingkan kesetaraan dan kerjasama.

Tantangan :

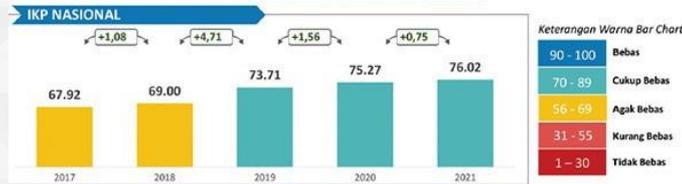
- Meningkatnya paham dan tindakan radikalisme, ekstrimisme, terorisme, separatisme, primordialisme; menjadi ancaman terhadap pelaksanaan demokrasi dan wawasan kebangsaan;
- Permasalahan diskriminasi dan intoleransi masih sering terjadi di Indonesia terutama yang berbasis pada agama, gender, dan etnis;
- Keadaban digital masyarakat Indonesia masih rendah.

Keterbukaan Informasi Publik 2021



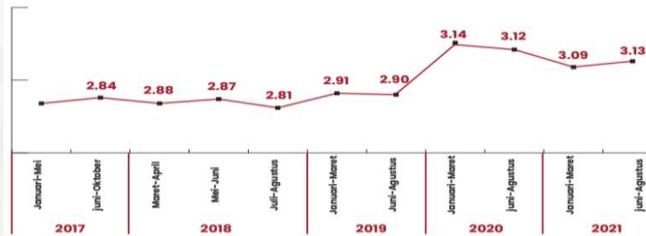
- Masih rendahnya jumlah badan publik yang *informative* (84/24,9%) *political will*, *penyediaan informasi dasar*, *inovasi yang tepat sasaran* menjadi masalah utama.
- *Pengelolaan komunikasi publik pusat dan daerah* masih belum efektif. Belum adanya *standarisasi system* serta *kurangnya kapasitas SDM*.

Indeks Kemerdekaan Pers 2017-2021



- **Indeks Kemerdekaan Pers 2021 (76,02)** mengalami kenaikan, namun **tekanan dan premanisme** terhadap jurnalis, **rendahnya kesejahteraan jurnalis serta kesetaraan akses bagi kelompok rentan dan disabilitas** masih menjadi masalah.

Indeks Kualitas Penyiaran TV 2017-2021



- **Indeks Kualitas Siaran TV 2021**, terjadi peningkatan atas kualitas TV Indonesia, namun *variety show (2,92)*, *infotainment (2,62)*, dan *sinetron (2,59)* masih konsisten dengan nilai terendah
- **UU Ciptaker** yang mengubah *landscape* penyiaran Indonesia khususnya isu **demokratisasi penyiaran**.

Tantangan

- Tantangan kebebasan/kemerdekaan pers
- Tantangan anonimitas di dunia maya: mengancam integrasi sosial
- Isu ketimpangan dalam konvergensi media digital
- Praktik konglomerasi pers
- Tantangan literasi digital masyarakat yang rendah

- **Penguatan Parpol di Tingkat Nasional & Lokal**
 - Rekrutmen dan kaderisasi politik berdasarkan kompetensi (meritokrasi);
 - Penguatan hubungan parpol dengan pemilih (*Party Identification*);
 - Pemanfaatan *platform* digital untuk transparansi dan akuntabilitas parpol;
 - Posisi partai politik oposisi;
 - Pengelolaan keuangan partai politik yang akuntabel dan transparan.
- **Penyempurnaan Sistem Politik yang Lebih Inklusif**
 - Penguatan afirmasi perempuan dalam politik;
 - Dorongan keterlibatan kaum muda (milenial) terlibat dalam politik;
- **Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas**
 - Antisipasi politik uang dalam pemilihan yang berdampak pada politik biaya tinggi;
 - Menjaga netralitas ASN dalam pemilu;
 - Penyempurnaan digitalisasi pemilu melalui berbagai inisiatif: SIPOL, *e-counting*, e-rekap, data pemilih, dsb.
- **Penguatan Lembaga Perwakilan Menuju Parlemen Modern**
 - Perwujudan *Open parliament* dan *e-Parliament* untuk menguatkan relasi legislator dengan konstituen.
- **Penguatan Masyarakat Sipil**
 - Pendanaan masyarakat sipil yang berkelanjutan;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat sipil;
 - Peran penting masyarakat sipil sebagai agen utama pendidikan kewarganegaraan.

- **Penguatan Toleransi dan Integrasi Sosial**
 - Menguatnya isu SARA, perlu diantisipasi
 - Politisasi identitas dalam kehidupan sosial politik.

- **Kebajikan/Keadaban Sipil (*Civic Virtues*)**
 - Meningkatnya kekerasan masyarakat karena kebebasan yang tidak terkendali;
 - Kepatuhan pada hukum yang rendah, kepatuhan sebagai bagian dari nilai yang *embedded*.

- **Tantangan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**
 - Radikalisme agama meningkat, bahkan di dunia pendidikan, lingkungan BUMN dan birokrasi;
 - Pentingnya menumbuhkan kehidupan keagamaan yang moderat;
 - Monopoli kebenaran agama dan ketidakbisaan berdialog.

- **Penguatan Lembaga Komunikasi dan Informasi Publik**
 - Integrasikan layanan informasi publik ke dalam layanan dasar masyarakat berbasis *e-government*;
 - Mendorong tata kelola komunikasi publik agar masyarakat lebih produktif;
 - Penyusunan sistem komunikasi yang terintegrasi untuk menciptakan pemerataan keadilan informasi bagi masyarakat.
- **Isu Kekerasan dan Kesejahteraan Jurnalis.**
 - Mengatur lebih tegas standarisasi upah minimum dan hak-hak minimum jurnalis, terutama terhadap jurnalis kontributor;
 - Memastikan kepatuhan perusahaan pers dalam mengikat kontrak dan kemitraan dengan jurnalis yang sesuai dengan UU Tenaga Kerja;
 - Menjadikan *best practices* MoU jurnalis dengan Polri untuk kemungkinan inisiatif pembentukan peraturan dari Polri.
- **Peran Strategis Media Lokal**, mendorong fasilitasi penyiaran digital berbasis lokal dan komunitas.
- **Oligarki Media Nasional**
 - Mendorong efektivitas peraturan tentang konglomerasi media dan penegakan hukum terhadapnya;
 - Mendorong terwujudnya pemberitaan media yang merata dan inklusif.
- **Algoritma Platform Digital**
 - Antisipasi eran “orang kuat” dalam memborong konten dan mendikte algoritma karena menimbulkan ketidakadilan informasi publik.
- **Literasi Media dan Literasi Digital**, mendorong masyarakat agar melek literasi baik media konvensional maupun media digital.
- **Kebebasan Pers**
 - Melakukan edukasi masyarakat peran strategis pers sebagai bagian dari kontrol sosial sehingga perlu dihormati;
 - Mendorong sengketa penyelesaian pers melalui Dewan Pers untuk meminimalisir peran kepolisian.

Menyempurnakan **sistem politik** dengan memperkuat **sistem pemilu, kepartaian, dan representasi**, serta **mekanisme jaminan atas partisipasi masyarakat dan iklim komunikasi publik** yang kondusif **berwawasan kebangsaan**

Digitalisasi

Menciptakan lingkungan demokrasi digital yang kondusif dan aman bagi masyarakat, mampu melibatkan masyarakat dalam **partisipasi politik**, serta **mendorong terselenggaranya praktik politik dan tata pemerintahan yang modern dan akuntabel**.

PEMBANGUNAN
POLITIK

Sistem

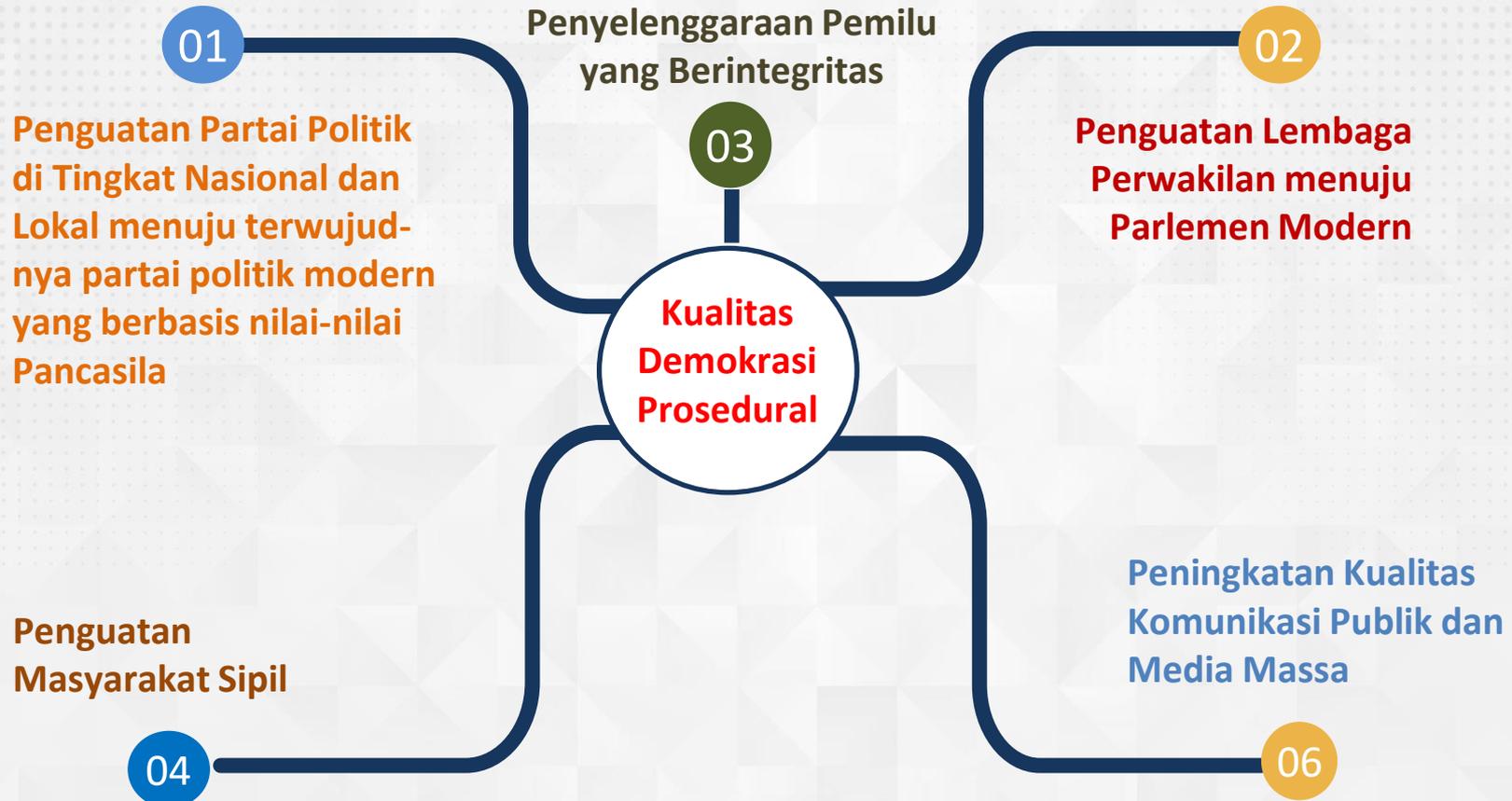
Memperkuat kelembagaan demokrasi utama seperti **partai politik, parlemen, pemerintah** serta **aktor-aktor masyarakat dan media massa**

Aktor

Ciri Demokrasi Prosedural:

- Jaminan **kebebasan warganegara**
- Pelaksanaan **Pemilu secara reguler**
- **Partisipasi** dalam pengambilan keputusan publik
- Jaminan **sumber informasi alternatif**
- **Rule of Law**

(Dahl, 1971,
Ferejohn & Pasquino, 2009)



SASARAN RPJMN 2025-2029 BIDANG POLITIK DAN KOMUNIKASI

Demokrasi prosedural yang berkualitas melalui penguatan lembaga demokrasi dengan menciptakan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, parlemen modern, dan partai politik yang berbasis nilai.

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

SUPRASTRUKTUR POLITIK			INFRASTRUKTUR POLITIK	
<p>Penguatan partai politik di tingkat nasional dan lokal menuju terwujudnya partai politik modern yang berbasis nilai-nilai Pancasila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ideologisasi partai politik berdasarkan ideologi Pancasila; 2. Penyempurnaan peraturan perundangan terkait partai politik, termasuk dalam hal pengaturan pendanaan parpol secara berkelanjutan; 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas partai politik dengan cara konvensional dan digital; 4. Pengarusutamaan partai politik inklusif berbasis kompetensi; 5. Penguatan hubungan partai politik dan masyarakat. 	<p>Penguatan lembaga perwakilan menuju parlemen modern</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem <i>check and balances</i> dalam rangka prinsip presidensialisme; 2. Peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan DPRD; 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga perwakilan melalui digitalisasi; 4. Penguatan hubungan lembaga legislatif dan masyarakat melalui kanal sesuai prinsip keterwakilan yang efektif. 	<p>Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan peraturan perundangan pemilu; 2. Peningkatan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu; 3. Penguatan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah, serta penyelenggara <i>ad-hoc</i>; 4. Pengoptimalan sistem digitalisasi pemilu; 5. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilu sebagai bagian dari partisipasi politik dan pengawasan yang berkualitas. 	<p>Penguatan masyarakat sipil yang sehat dan kuat sebagai mitra dan penyeimbang kekuasaan negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan masyarakat sipil sebagai aktor utama pendidikan kewargaan dan kebangsaan (<i>civic education</i>); 2. Pembentukan pusat-pusat pendidikan kewargaan dan kebangsaan di institusi pendidikan; 3. Pendanaan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas masyarakat sipil. 4. Penguatan transparansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 	<p>Peningkatan kualitas komunikasi publik dan media massa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L baik Pusat dan Daerah serta penyediaan konten dan akses yang merata dan setara; 2. Penguatan sistem penyiaran lokal; 3. Peningkatan efektifitas peraturan perundangan terkait pengaturan oligarki media; 4. Penguatan regulasi jalur distribusi media sosial; 5. Penguatan ekosistem kondusif bagi tumbuhnya kebebasan pers yang bertanggung jawab, termasuk upaya perlindungan dan kekerasan pers dan peningkatan kesejahteraan jurnalis

BASELINE

Indeks Demokrasi Indonesia (BPS)

Baseline 2021 : 78.12 (sedang)

Indeks Kerawanan Pemilu (Bawaslu)

Baseline 2019 : 48.88 (sedang)

Tingkat Partisipasi Pemilih (KPU)

Baseline Pemilu 2019 : 81.69

Party Identification

Baseline Jan 2021 (LSI) : 12

Indeks Kebebasan Pers (Dewan Pers)

Baseline 2022 : 77.88 (cukup bebas)

Indeks Literasi Digital (Kominfo)

Baseline 2021 : 3.49 (sedang)

Indeks Aktualisasi Pancasila (BPIP)

Baseline 2021 : 76.78

TARGET 2029

Indeks Demokrasi Indonesia (BPS)

Target 2029 : 81.00 (baik)

Indeks Kerawanan Pemilu (Bawaslu)

Target 2029 : 38.00 (sedang)

Tingkat Partisipasi Pemilih (KPU)

Target Pemilu 2029 : 85.00

Party Identification

Target 2029 : 20

Indeks Kebebasan Pers (Dewan Pers)

Target 2029 : 82.00 (cukup bebas)

Indeks Literasi Digital (Kominfo)

Target 2029 : 4.00 (baik)

Indeks Aktualisasi Pancasila (BPIP)

Target 2029 : 77.00



TERIMA KASIH

